

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah berfungsi sebagai perwakilan dari pemerintah pusat dan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi serta memajukan potensi yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah pusat sepenuhnya menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, yang didasarkan pada hak otonomi. Salah satu cara pelaksanaan kewenangan daerah ini adalah melalui otonomi daerah (Pradana & Handayani, 2023).

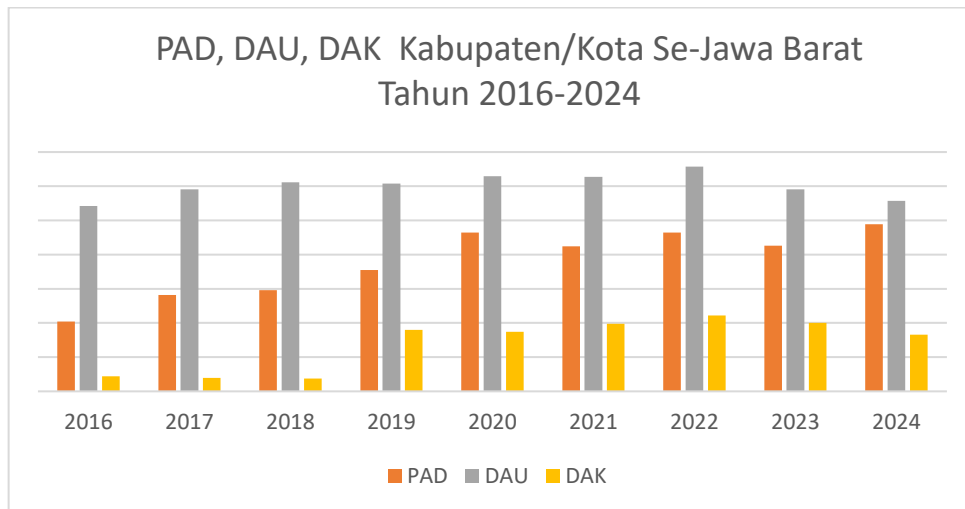
Daerah otonom harus memiliki kapasitas keuangan yang cukup sebagai dasar dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah secara mandiri tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat (Setiawan et al., 2021). Kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dapat tercermin dari kapasitasnya dalam mengelola pendapatan serta pembiayaan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mencapai kondisi ideal apabila setiap tingkat pemerintahan mampu mengelola keuangannya secara mandiri guna mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan kewenangan daerah secara otonom dapat berjalan optimal apabila diikuti dengan penerapan desentralisasi fiskal, yaitu pemberian hak kepada daerah untuk memungut, mengelola, dan menggunakan sumber pendapatan daerahnya sendiri, serta memperoleh dukungan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat (Fadhila & Susilowati, 2025).

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun

kabupaten/kota, dalam mengelola keuangan daerahnya. Sebagai konsekuensi, komponen penerimaan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi variabel kunci dalam evaluasi kemandirian fiskal daerah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi transfer fiskal dapat memperkuat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Putri & Ratnawati, 2023).

Pada tingkat kabupaten/kota, khususnya di provinsi besar seperti Provinsi Jawa Barat, kondisi sangat dinamis akibat banyaknya faktor internal (potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kapasitas administrasi) dan eksternal (kebijakan nasional, alokasi transfer). Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum selalu diimbangi dengan kemandirian keuangan yang sesuai harapan karena tergantung pula pada besaran dan efektivitas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima (Wahyudin & Hastuti, 2020).

Salah satu komponen utama yang memengaruhi kemandirian Keuangan Satu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatannya secara mandiri, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh menurun, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat cenderung meningkat, sehingga kemandirian keuangan daerah menjadi lebih rendah. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Kenaikan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam struktur pendapatan daerah biasanya menunjukkan meningkatnya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, sehingga kemandirian keuangan daerah menurun, dan berlaku sebaliknya apabila ketergantungan terhadap dana transfer berkurang (Hidayat et al., 2025).



Gambar 1. 1 Perbandingan PAD, DAU, DAK Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2016–2024

Sumber: (Data diolah, 2025)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2016–2024. Secara umum, grafik tersebut memperlihatkan ketimpangan yang cukup besar antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlihat mengalami kenaikan secara bertahap setiap tahun, tetapi tetap berada jauh di bawah Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih terbatas dan mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal serta rendahnya kemandirian keuangan daerah.

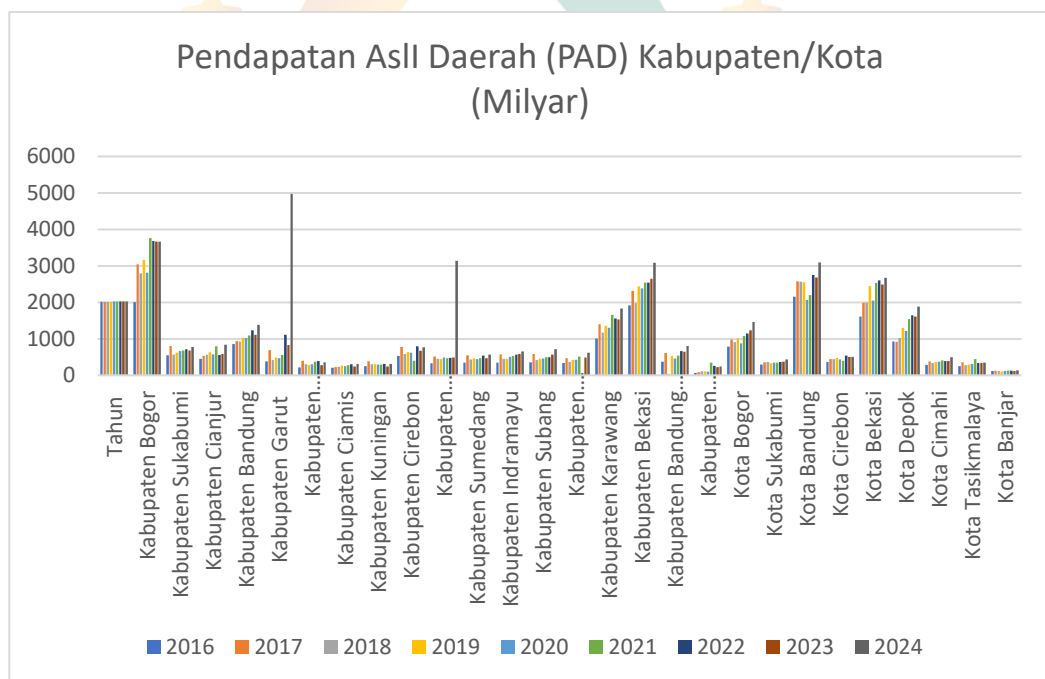
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dengan nilai paling dominan dalam grafik dan menunjukkan tren yang relatif stabil serta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan kabupaten/kota di Jawa Barat terhadap transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan belanja operasional dan pelayanan publik. Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pola yang fluktuatif meskipun secara umum meningkat.

Perbandingan ketiga komponen pendapatan tersebut menegaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi sumber pendapatan terbesar, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga struktur pendapatan daerah masih belum ideal karena porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil tidak sebanding dengan besarnya transfer pusat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah tanpa menimbulkan gangguan terhadap kebijakan fiskal makro pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengakses instrumen pendapatan yang memadai sehingga mereka dapat memanfaatkan ruang fiskal guna meningkatkan penerimaan tambahan secara lebih mandiri, bertanggung jawab, serta akuntabel kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja secara lebih efisien sesuai kebutuhan daerahnya (Sari & Qibthiyah, 2022).

Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan juga menimbulkan berbagai implikasi penting terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Salah satu dampak utamanya adalah berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), umumnya disertai dengan ketentuan penggunaan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan penuh dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, sehingga ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan fiskal serta pembangunan yang adaptif terhadap permasalahan masyarakat setempat menjadi sangat terbatas.

Selain itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah di beberapa kabupaten/kota juga memperburuk tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah. Akibatnya sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan (Handaini et al., 2024).

Penyebab kondisi rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat Pemda Kabupaten/Kota adalah *pertama*, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. *Kedua*, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. *Ketiga*, masih rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat dan *keempat*, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Dengan kata lain, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemda kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021).



Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2016–2024

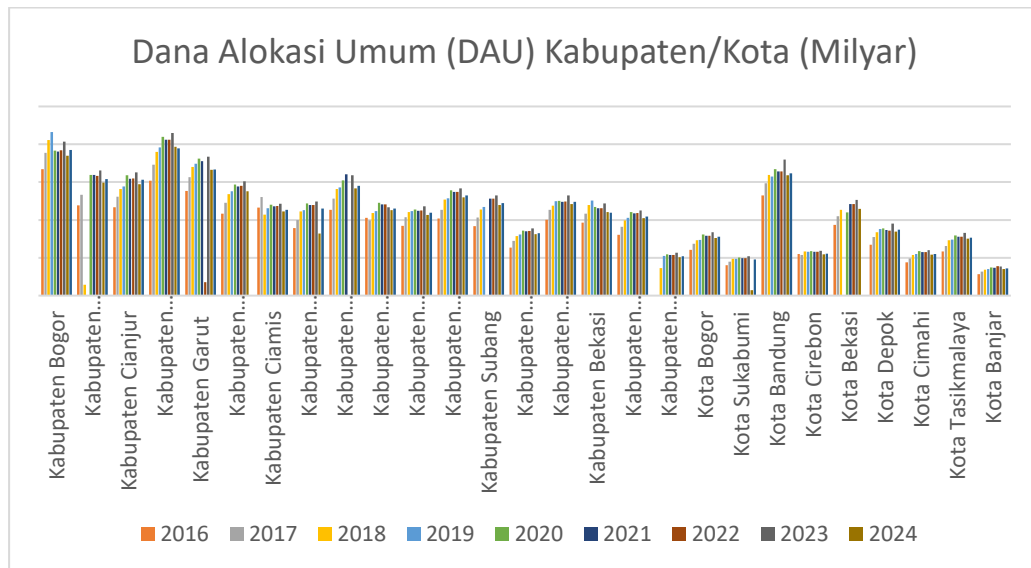
Sumber: diolah Penulis (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Hal ini mengindikasikan daerah tersebut memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar. Kemampuan daerah-daerah

tersebut dalam menghimpun pajak daerah, retribusi, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi lokal berjalan kuat, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat (DAU dan DAK) dapat ditekan.

Sebaliknya, daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Banjar tampak belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai. Ketergantungan fiskal mereka terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menjadi relatif tinggi, yang tercermin dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Dalam konteks kemandirian keuangan, daerah-daerah tersebut cenderung berada pada kategori belum mandiri, karena porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil dibandingkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli untuk membiayai kegiatan pemerintahannya tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2021) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada provinsi di Pulau Sumatera, yang berarti semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah. Penelitian (Suharjo, 2025) juga mendukung hasil tersebut, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan provinsi di Indonesia pada periode 2019. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun, semakin mandiri pula daerah tersebut secara keuangan.



Gambar 1. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2016–2024

Sumber: diolah Penulis (2025)

Gambar 1.3 menggambarkan perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2016–2024. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan yang stabil pada hampir seluruh daerah, mencerminkan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme transfer yang berfungsi menjaga pemerataan kemampuan keuangan antarwilayah. Kenaikan ini tampak konsisten terutama sejak tahun 2014 hingga 2019.

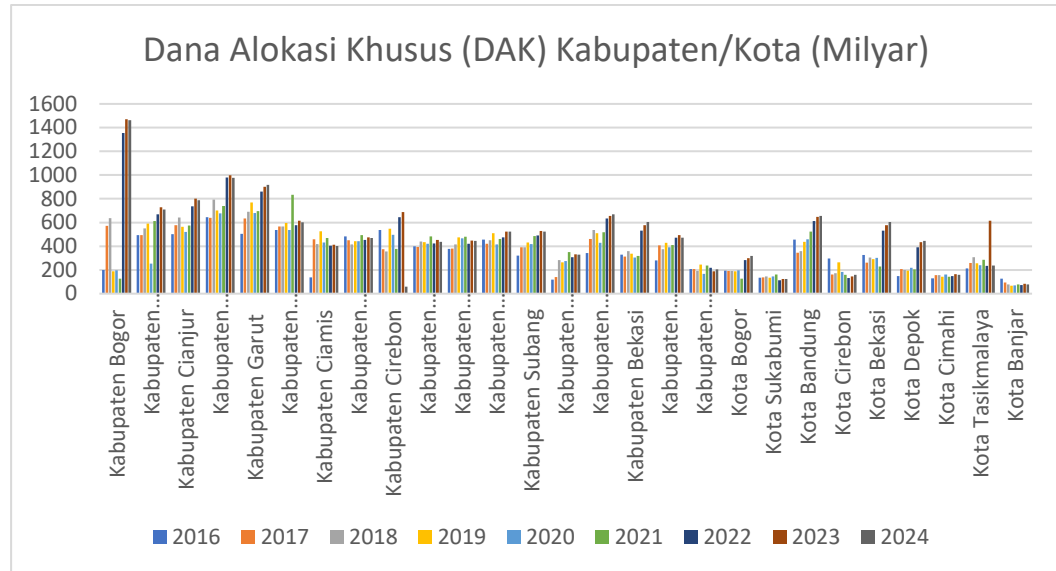
Perbedaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) antarwilayah dalam grafik juga menunjukkan adanya variasi kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Daerah seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, terlihat menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan skala fiskal lebih kecil seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, atau Kota Cimahi. Ketergantungan yang besar pada Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah, serta menandakan

bahwa kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri belum optimal (Agustina et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan pola dalam grafik, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dalam struktur pembiayaan daerahnya. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU) tetap menjadi sumber pendanaan dominan di banyak wilayah. Implementasi Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode tersebut mengindikasikan bahwa transfer pemerintah pusat masih menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal, terutama bagi daerah yang belum memiliki kapasitas fiskal memadai (Fadhillah, 2024).

Berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh negatif. Menurut Sari et al. (2022), Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer dari pemerintah pusat, penggunaannya yang efektif dapat membantu daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandiriannya. Namun, temuan berbeda diungkapkan oleh (Suharjo, 2025) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah di tingkat provinsi di Indonesia. Artinya, semakin besar dana perimbangan yang diterima melalui Dana Alokasi Umum (DAU), semakin tinggi pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hasil ini diperkuat oleh Setiawan et al. (2021) yang juga menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Pulau Sumatera. Secara teoritis, perbedaan hasil ini dapat terjadi karena besarnya porsi Dana Alokasi

Umum (DAU) justru mendorong daerah menjadi pasif dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya.



Gambar 1. 4 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Se- Jawa Barat Tahun 2016–2024

Sumber: diolah Penulis (2025)

Gambar 1.4 menggambarkan perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama 2016–2024, terlihat bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada pertengahan periode penelitian. Pada tahun-tahun awal, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) relatif masih rendah. Kabupaten/kota besar seperti Bogor, Bandung, Garut, Sukabumi, dan Bekasi tampak konsisten menerima alokasi terbesar karena kebutuhan pembangunan yang lebih luas dibandingkan wilayah perkotaan yang cenderung menerima alokasi lebih kecil. Pemerintah daerah kerap menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya, karena belum sepenuhnya mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi pendapatan yang dimiliki. Akibatnya masih bergantung terhadap transfer pusat dapat memengaruhi kapasitas fiskal serta tingkat kemandirian keuangan daerah (Sania et al., 2024).

Sementara itu, hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan kecenderungan yang tidak konsisten. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dasarnya merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat spesifik dan digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional, sehingga tidak secara langsung meningkatkan fleksibilitas fiskal daerah. Berdasarkan penelitian (Setiawan et al., 2021) menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah Sumatera. Namun, penelitian Suharjo (2025) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, di mana semakin besar penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskal daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi hambatan utama bagi peningkatan kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

- 1 Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan total daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal masih terbatas. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, karena pemerintah daerah menjadi sangat bergantung pada dana transfer dari pusat untuk membiayai program pembangunan. Dengan kata lain, semakin kecil kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah pula kemampuan daerah untuk beroperasi secara mandiri tanpa intervensi fiskal dari pemerintah pusat.

- 2 Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi karakteristik utama dalam struktur keuangan sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pemerintah pusat berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antar daerah, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketergantungan fiskal yang cukup tinggi. Ketergantungan ini dapat mengurangi kemampuan daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri, karena sebagian besar belanja daerah bergantung pada alokasi dari pusat. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) perlu diiringi dengan strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
- 3 Selain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi komponen penting dalam struktur keuangan daerah di Jawa Barat. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, karena penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah sering kali tidak memiliki keleluasaan dalam menyesuaikan program tersebut dengan kebutuhan lokal. Ketergantungan terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membatasi fleksibilitas keuangan daerah dan memperlambat inovasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat lebih selaras dengan potensi dan kebutuhan spesifik setiap wilayah di Jawa Barat.
- 4 Kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada umumnya masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingginya proporsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan secara mandiri. Kondisi tersebut menandakan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih terbatas. Kemandirian fiskal yang rendah dapat membatasi ruang inovasi kebijakan dan menghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan kemandirian keuangan

dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan, serta perbaikan tata kelola fiskal agar pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada dana pusat.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemandirian Keuangan
2. Objek penelitian yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan DJKP Kemenkeu dan BPS
4. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016-2024

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang diidentifikasi peneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penentu kemandirian keuangan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAU) selama periode 2016–2024. Peneliti merangkum permasalahan yang diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemandirian Keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016–2024.

2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik itu untuk tujuan akademik maupun untuk wajib pajak atau instansi terkait. Maka, manfaat dibuatnya penelitian ini dipaparkan seperti dibawah ini:

a. Manfaat Teoritis:

Studi ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemandirian keuangan daerah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada kajian ilmiah mengenai kebijakan fiskal serta pengelolaan keuangan daerah di tanah air.

b. Manfaat Praktis:

Dalam praktiknya, hasil dari penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan kebijakan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berpotensi memberikan pandangan bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami dengan mudah paparan penelitian secara sistematis, peneliti telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dijelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Uraian ini mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan informasi terkait teori-teori yang relevan serta ulasan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar dan landasan yang kuat bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat informasi mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, mencakup populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis serta sumber data, dan metode analisis data yang dipilih untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, dijelaskan hasil yang diperoleh dari pengolahan data penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam metodologi.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup ini menyajikan rangkuman dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang relevan terkait penelitian tersebut.